

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kehidupan politik di Tidore yang semakin demokratis sebagai akibat dari perubahan sistem politik Negara yang dimulai dari era Orde Lama, Orde Baru, dan kini Orde Reformasi. Perubahan ini kemudian memberikan ruang kepada siapa saja untuk menjadi pemimpin di Tidore. Dalam menentukan seorang pemimpin yang pada prinsipnya untuk menjadi WaliKota Tidore maka memaksa elite-elite politik di Tidore dengan kreasinya untuk mempertahankan status keelitannya atau dilain pihak reaksi orang-orang dalam bentuk kelompok maupun individu yang berusaha meligitimasi diri untuk masuk pada pusaran kekuasaan yang diinginkan.

Perubahan sistem yang semakin demokratis maka memaksa elite kesultanan (elite non politik) di Tidore yang awalnya lahir secara historis dan diindentik dengan sistem ‘aristokrasi’ berusaha untuk menyesuaikan diri menjadi elite politik. Hal ini disebabkan karena kondisi politik Tidore saat ini lebih dilihat keelitan seseorang berdasarkan kekuatan politik formal dan kekuatan finansial. Dan disisi lain posisi sultan tidak sinergi dengan sistem yang demokratis karena jabatan kesultanan hanya dipilih berdasarkan keturunan semata.

Pilwako (Pemilihan Walikota) di Tidore pada periode 2005-2010 dan 2010-2015 di nilai sebagai bentuk pertarungan kedua kelompok yang ada di Tidore, di antaranya: kelompok *gam-gam* (orang kota) dan kelompok *gura-gura* (orang luar

kota; orang gunung). Pertarungan ini memposisikan *gam-gam* sebagai kelompok yang lama berkuasa di birokrasi Pemerintahan Tidore dan *gam-gam* sebagai kelompok yang berusaha melegitimasi diri agar bisa duduk di birokrasi Pemerintahan Tidore. Kejenuhan kelompok *gura-gura* terhadap sistem birokrasi yang selalu didominasi oleh kelompok *gam-gam* terjawab ketika kedua momen Pilwako (2005-2010 dan 2010-2015) di Tidore mengantarkan Achmad Mahifa sebagai representasi kelompok *gura-gura* pada posisi puncak Pemerintahan Tidore (menjadi Walikota).

Terjadi dikotomi antara kelompok *gam-gam* dan *gura-gura* awalnya belum terlihat di permukaan kehidupan masyarakat. Dikotomi ini mulai terlihat jelas pada Pilwako Tidore pada periode 2005-2010. Kala itu satu-satunya sosok calon Walikota yang direpresentasikan dari kelompok *gura-gura* hanyalah Achmad Mahifa dan menjadi isu yang paling laris di konsumsi masyarakat, terutama kelompok *gura-gura*. Tidak cukup disitu kehadiran Achmad Mahifa juga dinilai sebagai sosok baru di antara calon-calon yang lain.

Namun, dalam suksesi Achmad Mahifa ada perbedaan 'isu politik' dalam kedua momen penting ini. Momen 2005-2010 dinilai sebagai 'isu' yang dimainkan lebih mengarah pada dikotomi antara kelompok *gam-gam* dan *gura-gura*. Pertimbangan momen 2005-2010 Achmad Mahifa sebagai sosok baru maka dipromosikan melalui pengutan 'identitas' yang dikenal dengan kelompok *gam-gam* dan *gura-gura*. Terjadi peralihan 'isu' pada momen 2010-2015 yang cenderung dimaikan pada kesuksesan program yang di lakukan Achmad Mahifa pada periode

pertama (2005-2010). Peralihan isu dinilai sebagai suatu bentuk strategi kelompok *gura-gura* untuk mempertahankan Achmad Mahifa pada puncak Pemerintahan Tidore. Dimana 'isu' tentang keberhasilan program kerja Achmad Mahifa pada periode pertama maka dengan sendirinya dapat merauk suara-suara dari kelompok *gam-gam* yang secara 'identitas' kelompoknya memang berbeda. Keberhasilan ini kemudian dibaca pada momen 2005-2010, Achmad Mahifa harus menang dengan melalui pemilihan pada putaran kedua. Dan kemudian terjadi percepatan kemenangan pada momen 2010-2015 yang hanya dirai dengan pemilihan satu putaran.

Keberhasilan Achmad Mahifa menjadi WaliKota Tidore selama dua periode (2005-2010 dan 2010-2015) mendorong terjadinya perubahan struktur elite di Tidore. dimana sebelumnya birokrasi pemerintahan banyak dikuasai oleh kelompok *gam-gam* mulai berasur-angsur diduduki oleh kelompok *gura-gura* pada jabatan strategis lain yang pada awalnya memang belum pernah ada. Dalam temuan lain ada oknum-oknum tertentu yang dari segi kepangkatan belum layak kemudian di angkat menjadi pejabat yang di indentifikasi merupakan kelompok *gura-gura* dan orang-orang dekatnya Bapak Walikota. Mengisahkan hal yang sama juga ketika ada penerimaan CPNS di Tidore beberapa tahun belakangan.

Berbagai dinamika yang terjadi di kehidupan masyarakat Tidore sebelumnya maupun saat ini sebagai bagian permainan elite politik yang tidak terlepas dari yang namanya *patron clint*, dimana siapa saja yang berkuasa di pemerintahan pada waktu tertentu, sudah menjadi hukum alam yang diidentik dengan memprioritaskan

kolporasi tertentu yang punya kedekatan emosional dengan sang pemimpin (Walikota), pada hal idealnya seorang pemimpin adalah mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat yang ada di wilayah kekuasaannya.

## **B. Saran**

Sifat elitisme yang ada dalam masyarakat sebagai suatu yang lahir secara alamiah, dimana kelompok minoritas yang dinamakan elite politik dapat menguasai lini kehidupan masyarakat yang pada posisi mayoritas. Kehidupan sekarang ini yang serba ‘materialitis’, bukan berarti posisi keelitan ini direbut untuk memperkuat ‘identitas’ kelompok tertentu. Tidore dalam pemerintahan kekinian sangat membutuhkan pendidikan politik untuk dapat memberikan kontribusi dalam kemajuan daerah. Pendidikan politik Tidore pada saat ini lebih dititikberatkan pada elite politik sebagai suatu bentuk penentu arah daerah. Dengan belum mapan secara kedewasaan politik oleh elite-elite politik di Tidore sebagai pemegang kekuasaan kemudian menimbulkan suatu warna yang mencekam ditandai dengan mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dan ingin saling mendominasi, sehingganya sering mengancam kepentingan masyarakat secara umum.

Tidak dapat dihindari terjadinya hubungan yang kurang harmoni (konflik) dalam masyarakat Tidore dalam momentum hajatan politik sebagai bentuk jelmaan dari pada tindakan para elite-elite politik yang ada di Lembaga Legislatif dan Eksekutif. Kejadian ini karena masyarakat belum terlalu banyak mendapatkan

edukasi; politik dari pemerintah baik yang terakomodir dalam partai politik maupun di luar partai politik. Makanya hal terpenting adalah mematangkan pendidikan politik baik itu para elite politik maupun masyarakat Tidore pada umumnya agar bisa menciptakan sebuah kondisi yang harmoni pada momen hajatan politik seperti Pilwako dan juga terintegrasi dalam suatu pemerintahan yang berjalan tanpa memandang kelompok atau individu mana yang berkuasa.

Walaupun penulisan ini dinilai masih kurang tetapi setidaknya temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan juga dapat menjadi kerangka acuan dalam kajian-kajian tentang elite politik lokal kedepan yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Tidore pada khususnya dan masyarakat secara umum.